



Radar Bali

Dirut PD Parkir Ngaku Semua Klir

DENPASAR - Nyoman Gde Sudiantara, Direktur Utama PD Parkir, penyertaan modal yang dianggap pihak Kejari Denpasar bermasalah adalah sudah diklarifikasi pihaknya ke Kejari langsung beberapa waktu lalu. Pihaknya menganggap, sudah tidak ada masalah, sudah klir dan pihak Kejari sudah menerima.

"Sudah tidak ada masalah. Saya ini hormat dengan hukum. Bahkan saya yang ke Kejari untuk menjelas-

kan perihal tersebut. Dan pihak Kejari pun sudah menerima penjelasan saya," ujar Gde Sudiantara.

Ia melanjutkan, sejak berdirinya PD Parkir di Denpasar, penyertaan modal hanya sebesar Rp 137.421.000 berbentuk barang yang tercantum dalam berita acara serah terima barang Nomor: 028/1924a/PERLENG, tertanggal 16 Agustus 2004 ■

► Baca *Dirut...* Hal 35

Pemeriksaan Jalan Terus

■ DIRUT...

Sambungan dari hal 21

dan hal tersebut sudah disetujui dewan pada waktu itu berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. "Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Sudah ada Perda yang jelas tentang itu, dan kami di PD Parkir selama ini tidak pernah ada penyertaan modal," tegasnya.

Disinggung mengenai nilai penyertaan modal yang disebutkan dalam temuan BPK RI sebesar Rp 3,3 miliar lebih tersebut, Gde Sudiantara langsung membantahnya, bahkan pihaknya sudah mengklarifikasi kepada pihak BPK RI terkait masalah tersebut.

Gde Sudiantara menjelaskan, Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar pasal 35 poin b dan c bahwa dana senilai Rp 3,3 miliar lebih tersebut terdiri dari anggaran perusahaan daerah, dan cadangan umum. Di mana nilai Rp 3,3 miliar lebih tersebut merupakan Total Ekuitas PD Parkir Kota Denpasar berdasarkan Neraca untuk Tahun

berakhir 31 Desember 2013 dengan rincian Cadangan Anggaran Perusahaan daerah sebesar Rp 2.237.472.338, dan Cadangan Umum sebesar Rp 989.364.106. "Laporannya lengkap, dan bahkan masalah ini sudah *clear* bagi kami," terangnya, sambil menunjukkan bukti-bukti dokumen resmi laporan keuangan dan beberapa dokumen Perda yang mengatur.

Sementara itu, disinggung mengenai tarif parkir yang sempat naik dari Rp 500 ke Rp 1000. Gde Sudiantara mengatakan, jika pungutan tersebut mempunyai dasar hukum sesuai dengan Perda Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran pasal 7 yang menyatakan bahwa, Sistem pengelolaan tempat parkir khusus, dan ketentuan-ketentuan lainnya ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan antara unit satuan kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggara perparkiran sebagaimana di maksud dalam pasal 2 dengan pihak ketiga

"Dan itu tidak salah, semua sudah sesuai dengan aturan. Bahkan kami (PD Parkir, Red) tidak berani memungut tanpa dasar Mou atau kesepakatan antara pemilik lahan

parkir dengan kami. Jadi sebenarnya semua sudah diatur dalam Perda, kalau yang tidak tau berarti belum baca Perda," imbuhnya.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Denpasar memastikan sudah ada perintah dari Kajari Denpasar. Tak hanya perintah, Kajari juga sudah menyerahkan data untuk menuntaskan dugaan korupsi di PD Parkir.

"Tadi pagi (kemarin pagi) saya dipanggil Pak Kajari, kemudian disampaikan agar segera bergerak. Bahkan Bapak (Kajari) sudah pegang data, data itu sudah diserahkan ke saya untuk menuntaskan kasus PD Parkir," ungkap Syahrir saat memberikan penjelasan ke koran ini. Dia juga mengatakan, segera tim untuk bekerja atas kasus ini. "Kami segera akan bekerja," ungkapnya.

Terkait kasus perjalanan dinas (Perdin) di Pemkot Denpasar Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir menjelaskan bahwa ada dua saksi yang diperiksa kasus dugaan korupsi Perdin. Sudah diperiksa sejak pukul 09.00, dua orang ini adalah Bendahara Sekretariat Dewan Kota Denpasar Nyoman Astina, satunya lagi Kabag Umum di Sekretariat Dewan juga. (hen/art/pit)

Edisi : Jumat, 22 Mei 2015

Hal : 35



Usut Jagrem, Kejari Geledah Tiga Tempat

TABANAN - Pasca penetaan dua tersangka yakni I Gede Jagrem dan Candra Dewi dalam kasus dugaan pemerasan CPNS di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) pemkab Tabanan kini Kejari Tabanan terus menyempurnakan. Kali ini Tim Kejari berkekuatan 6 orang tim pengeledah dan satu regu berjumlah 9 orang petugas kepolisian melakukan pengeledahan. Tidak tanggung-tanggung tiga tempat digeledah sekaligus yakni kantor DKP di Jalan Pahlawan nomer 1A, Kantor Nakerstran di jalan Wibisana Tabanan dan rumah tersangka I Gede Jagrem di Jalan Tendea, Gang Durian nomer 9, Banjar Anyar Kediri Tabanan, Kamis kemarin (21/5).

Tim Kajari dan Polres bergerak dari kantor Kejari Tabanan

sekitar pukul 10.00. Mereka langsung membagi diri menjadi dua tim. Tim pertama melakukan penggedahan di Kantor DKP Jalan Pahlawan nomer 1A yang dipimpin Kasipidsus Fathur Rochman, sementara tim kedua yang menggeledah Kantor Nakerstran tempat kini Jagrem menjadi Kabit dipimpin Kasiintel Lingga Nuarie.

Untuk pengeledahan di Kantor DKP disaksikan langsung KadisDKPIWayan Sugatra, yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga pukul 13.25. Sementara penggedahan di ruangan Jagrem di Nakerstran disaksikan kadis nakerstran Cok Alit Juli berlangsung tidak terlalu lama yakni dari pukul 10.00 hingga pukul 11.30 wita. "Kalau di sini (kantor Nakerstran) kita hanya menggeledah satu ruangan

yakni ruangan yang kini ditempati tersangka, jadi tidak terlalu lama," ucap Kasiintel Lingga Nuarie. Usai menggeledah kantor Jagrem, tim yang dipimpin Lingga kemudian bergerak ke banjar Dajan Tenten, Desa Banjar Anyar tepatnya Kapten Tendea, gang durian Nomer 9 yang merupakan rumah Jagrem. Dalam pengeledahan di rumah Jagrem itu petugas mengajak serta Kelian Dines setempat, I Wayan Riwa Yadi. Saat petugas tiba di rumah Jagrem, kebetulan

yang di rumah hanya istri Jagrem Ni Ketut Sumiati. Saat petugas menguatarakan niatnya Sumiati tampak pasrah. "Silahkan saja pak," ucapnya. (gin/pit)

Edisi : Jumat, 22 Mei 2015

Hal : 27